KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemulangan WNI Eks Isis; Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Terburu-buru
Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

PEMULANGAN WNI EKS ISIS

Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Terburu-buru

JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah tidak terburu-buru terkait rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari Timur Tengah. Puan meminta pemerintah untuk mencermati beberapa hal. Salah satunya, apakah 600 WNI eks ISIS itu masih memiliki paspor atau tidak.

"Apakah mereka secara sukarela meninggalkan paspor Indonesia untuk kemudian pergi ke satu negara untuk kemudian menjadi ISIS, itu yang pertama yang harus kita lakukan dan cermati," tandas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Kemudian, lanjutnya, apakah 600 WNI eks ISIS itu masih memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia. "Jadi jangan terburu-buru, kita lihat dulu seperti apa, situasi dan kondisinya di sana, apakah mereka itu masih mengakui sebagai warga negara Indonesia?" kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah yang lebih cermat dan lebih antisipatif jika 600 orang eks ISIS itu sudah tidak mau menjadi WNI. "Jadi jangan terburu-buru," kata mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi secara pribadi juga menolak pemulangan 600 WNI eks ISIS itu dari Timur Tengah ke Tanah Air. Sebab, eks kombatan ISIS itu telah membakar paspor Indonesia.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi enggan menjelaskan mengenai wacana pemerintah yang akan memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Timur Tengah. Menag justru menyarankan wartawan bertanya mengenai hal tersebut kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. "Wah itu nantilah biar dijelaskan Menko Polhukamnya," ungkap Fachrul Razi.

Dia juga mengaku tidak mengetahui apakah wacana itu akan dibicarakan dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tidak. "Oh belum tahu saya, saya tunggu informasi dari Menko Polhukam saja," katanya. Meski demikian, dia mengaku siap memberikan masukan terkait wacana tersebut jika diminta nantinya. "Nanti kalau beliau minta, saya kasih masukan. Enggak boleh lagi saya ngomong di sini karena kan sudah ada rapat Menko Polhukam," tandasnya. Namun, dia membantah dilarang Menko Polhukam Mahfud MD untuk berbicara kepada media massa mengenai isu tersebut. "Enggak, bukan dilarang, karena kan kalau sudah ditunjuk koordinir, kita yang ngomong enggak baik. Ngomongnya kepada yang koordinasi dong," ujarnya.

rico afrido simanjuntak